

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
KINERJA PERUSAHAAN DAERAH**
(Studi Empiris pada Perusahaan Daerah di Sumatera Barat)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

RYAN OKTAVIA NANDA
2007/84394

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Daerah (*Studi Empiris pada Perusahaan Daerah di Sumatera Barat*)"

Nama : Ryan Oktavia Nanda

NIM/BP : 84394 /2007

Program Studi : Akuntansi

Kecahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, 5 Februari 2015

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



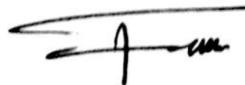
Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19720910199802 2 003

Pembimbing II



Nelvirita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19740706 199903 2 002

Ketua Prodi



Fefri Indra Arza, SE, M.Si, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

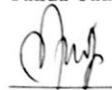
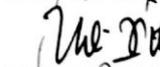
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN DAERAH**
(Studi Empiris pada Perusahaan Daerah di Sumatera Barat)

Nama : Ryan Oktavia Nanda
NIM/BP : 84394 / 2007
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 5 Februari 2015

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	
2. Sekretaris	: Nelvirita, SE, M.Si, Ak	
3. Anggota	: Halmawati, SE, M.Si	
4. Anggota	: Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ryan Oktavia Nanda**
NIM/Tahun Masuk : 84394/2007
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang / 26 Oktober 1988
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Tanah Datar III 86, Siteba, Nanggalo, Padang
No. Hp/Telepon : 085766540510
Judul Skripsi : "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Daerah (*Studi empiris pada perusahaan-perusahaan daerah di Sumatera Barat*)".

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun program perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Januari 2015
Yang menyatakan



Ryan Oktavia Nanda
84394/2007

ABSTRAK

Ryan Oktavia Nanda (2007/84394) Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Daerah. Skripsi. Universitas Negeri Padang. 2015

Pembimbing I : Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak

Pembimbing II : Nelvirita, SE, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Perusahaan Daerah. (2) Pengaruh Keterbukaan terhadap Kinerja Perusahaan Daerah. (3) Pengaruh Pertanggungjawaban terhadap Kinerja Perusahaan Daerah. (4) Pengaruh Kemandirian terhadap Kinerja Perusahaan Daerah. (5) Pengaruh Kewajaran terhadap Kinerja Perusahaan Daerah.

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah Perusahaan-perusahaan daerah yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Sampel ditentukan berdasarkan metode total sampling, sebanyak 25 perusahaan daerah dan total responden adalah 47 orang. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data dengan menggunakan regresi berganda dengan uji t

Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) Akuntabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Perusahaan Daerah. (2) Keterbukaan berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Perusahaan Daerah. (3) Pertanggungjawaban berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Perusahaan Daerah. (4) Kemandirian tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan Daerah. (5) Kewajaran berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Perusahaan Daerah.

Dalam penelitian ini disarankan agar Perusahaan Daerah lebih meningkatkan penerapan prinsip Akuntabilitas, Kemandirian dan Kewajaran agar dapat mencapai kinerja perusahaan yang efektif. Untuk penelitian selanjutnya, apabila peneliti juga menggunakan kuesioner yang sama sebaiknya menambahkan pernyataan negatif, agar benar-benar menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada praktik atau penerapan yang ada dilapangan. Selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas sampel dan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan daerah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Daerah (Studi Empiris pada Perusahaan Daerah di Sumatera Barat)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1), Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terima kasih kepada Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak (Alm) dan Ibu Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing I serta Ibu Nelvirita, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing II, yang telah memberikan ilmu, pengarahan, bimbingan, masukan, serta waktu bimbingan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak telah mendorong penulis untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Bapak/Ibu dewan direksi perusahaan daerah di Sumatera Barat beserta jajarannya yang telah membantu dalam proses penelitian.
5. Teristimewa untuk kedua orang tua dan segenap keluarga penulis atas segala do'a, motivasi, dan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang rekan-rekan seperjuangan atas motivasi, saran, dan informasi yang sangat berguna.
7. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan dan penulisan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan pengetahuan serba terbatas penulis berusaha menyajikan skripsi ini walaupun dapat dikatakan masih belum sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif dan edukatif penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	IV
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	11
C. TUJUAN PENELITIAN	12
D. MANFAAT PENELITIAN.....	12
BAB II	13
KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	13
A. KAJIAN TEORI	13
1. Kinerja Perusahaan.....	13
a. Pengertian Kinerja Perusahaan	13
b. Penilaian Kinerja.....	15
c. Pengukuran Kinerja.....	17
d. Indikator kinerja	17
2. Corporate Governance	25
a. Pengertian Corporate Governance	25
b. Prinsip-prinsip Corporate Governance.....	27
c. Manfaat Good Corporate Governance	33
d. Pengukuran Corporate Governance	34
B. PENELITIAN TERDAHULU	41
C. HUBUNGAN ANTAR VARIABEL	43
1. Hubungan Akuntabilitas dengan Kinerja Perusahaan Daerah	43
2. Hubungan Keterbukaan dengan Kinerja Perusahaan Daerah	44
3. Hubungan Pertanggungjawaban dengan Kinerja Perusahaan Daerah	45
4. Hubungan Kemandirian dengan Kinerja Perusahaan Daerah.....	46
5. Hubungan Kewajaran dengan Kinerja Perusahaan Daerah	48
D. KERANGKA KONSEPTUAL	49
E. HIPOTESIS	50
BAB III.....	51
METODE PENELITIAN	51
A. JENIS PENELITIAN.....	51
B. POPULASI DAN SAMPEL.....	51
1. Populasi.....	51
2. Sampel.....	51
C. JENIS DATA	53
D. SUMBER DATA	53

E.	METODE PENGUMPULAN DATA	53
F.	VARIABEL PENELITIAN	53
1.	Variabel Dependen (Variabel Y)	54
2.	Variabel Independen (Variabel X)	54
G.	PENGUKURAN VARIABEL	54
H.	INSTRUMEN PENELITIAN	55
I.	PENGUJIAN KUALITAS DATA	56
1.	Uji Validitas	56
2.	Uji Reliabilitas	57
J.	HASIL UJI COBA INSTRUMEN	58
K.	UJI ASUMSI KLASIK	59
1.	Uji Normalitas Residual	59
2.	Uji Multikolinearitas	59
3.	Uji Heterokedastisitas	59
L.	ANALISIS DATA.....	60
1.	Analisis Deskriptif	60
2.	Metode Analisis	61
a.	Koefisien Determinasi.....	61
b.	Persamaan Regresi Berganda.....	62
c.	Uji F (F-Test)	62
d.	Uji t (T-Test)	63
M.	DEFENISI OPERASIONAL.....	64
BAB IV		66
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		66
A.	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	66
B.	DEMOGRAFI RESPONDEN	67
C.	DESKRIPSI VARIABEL PENELITIAN	69
1.	Distribusi Variabel Kinerja Perusahaan Daerah.	69
2.	Distribusi Variabel Akuntabilitas.....	70
3.	Distribusi Variabel Keterbukaan.....	72
4.	Distribusi Variabel Pertanggungjawaban.....	74
5.	Distribusi Variabel Kemandirian	75
6.	Distribusi Variabel Kewajaran.....	76
D.	UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS	77
1.	Uji Validitas	77
2.	Uji Reliabilitas	78
E.	UJI ASUMSI KLASIK	79
1.	Uji Normalitas Residual.....	79
2.	Uji Multikolinearitas	80
3.	Uji Heterokedastisitas	81
F.	HASIL UJI MODEL	82
1.	Koefisien Determinasi.....	82
2.	Model Analisis	82
3.	Uji F	84
4.	Uji Hipotesis (T-Test)	85

G. PEMBAHASAN	87
1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Perusahaan Daerah	87
2. Pengaruh Keterbukaan Terhadap Kinerja Perusahaan Daerah.	88
3. Pengaruh Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Perusahaan Daerah.	89
4. Pengaruh Kemandirian Terhadap Kinerja Perusahaan Daerah.	91
5. Pengaruh Kewajaran Terhadap Kinerja Perusahaan Daerah.	92
BAB V.....	93
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN	93
A. KESIMPULAN.....	93
B. KETERBATASAN PENELITIAN	93
C. SARAN.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketidakmampuan perusahaan daerah di Sumatera Barat (Sumbar) untuk berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah menjadi permasalahan bagi pemerintah Sumbar dalam tahun-tahun terakhir ini. Hal ini dinilai terjadi karena manajemen tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik, sehingga kinerja perusahaan tidak optimal (Padang Ekspres, 2014).

Kinerja perusahaan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Hal ini pun berlaku bagi perusahaan daerah, sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, perusahaan daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi pada PAD. Untuk itu, perusahaan daerah harus memiliki kinerja yang baik, sehingga dapat memberikan hasil yang efektif dan efisien.

Untuk menjaga agar tercipta keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan dan pertanggungjawaban terhadap *stakeholder*. Maka diperlukan *corporate governance* agar nantinya pengelola perusahaan tidak bertindak untuk hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga menguntungkan pemilik perusahaan.

Nilai perusahaan akan meningkat jika perusahaan dapat beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan. Dari laba yang dihasilkan tersebut maka perusahaan akan mampu memberikan kontribusi terhadap PAD berupa deviden yang dibayarkan kepada pemerintah daerah sebagai pemilik perusahaan. Dan nantinya akan meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan menjamin terjadinya pembangunan yang berkelanjutan di daerah.

Kinerja perusahaan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Indra, 2010).

Dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, pimpinan melakukan tugasnya dibantu oleh pimpinan yang lain bersama dengan pegawai. Keberhasilan pimpinan melaksanakan tugasnya akan dipengaruhi oleh kontribusi pihak lain. Artinya, kinerja pimpinan akan dipengaruhi oleh kinerja pegawai, jika kinerja pegawai baik akan mempengaruhi kinerja pimpinan dan selanjutnya kinerja organisasi, untuk mengetahui perlu dilakukan pengukuran (Indra, 2010).

Larry D Stout (1993) dalam Bungo (2012) menyatakan bahwa penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan

kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.

Menurut (Kaplan & Norton, 2000), penilaian kinerja dapat diukur dengan menggunakan *balanced scorecard* yang terdiri dari ukuran keuangan dan nonkeuangan. Ukuran keuangan untuk mengetahui hasil tindakan yang dilakukan dimasa lalu dan ukuran keuangan tersebut dilengkapi dengan ukuran-ukuran nonkeuangan tentang kepuasan konsumen, produktivitas dan *cost effectiveness* proses bisnis intern serta produktivitas dan komitmen *stakeholders* yang akan menentukan kinerja keuangan masa yang akan datang. Ukuran nonkeuangan menunjukkan akibat dari berbagai tindakan yang terjadi di luar keuangan. (Kaplan & Norton, 2000) juga menyatakan indikator kinerja non keuangan terdiri dari ukuran kinerja dari perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Undang-undang Republik Indonesia No 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah, mendefinisikan perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan berdasarkan undang-undang.

Perusahaan daerah memainkan peranan penting dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah. Perusahaan daerah memberikan kontribusi bagi pengembangan perekonomian daerah melalui kegiatan produksi barang dan jasa. Perusahaan daerah juga memiliki peranan penting dalam proses alokasi sumber daya yang bersifat strategis bagi masyarakat.

Perusahaan daerah sebagaimana layaknya perusahaan pada umumnya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented*). Keuntungan yang diperoleh tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang ditujukan untuk membiayai pembangunan di daerah. Dengan cara ini perusahaan daerah mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena inilah banyak daerah yang mengandalkan perusahaan daerah sebagai salah satu sumber pemasukan daerahnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan daerah merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan daerah yang modalnya berasal dari pemerintah daerah dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya, sehingga nantinya akan menghasilkan laba yang akan berkontribusi terhadap PAD dan akan menjamin terjadinya pembangunan yang berkelanjutan di daerah yang bersangkutan. Kinerja perusahaan daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah dan kegiatan pembangunan daerah, karena keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan daerah akan sangat berperan dalam meningkatkan PAD.

Menurut Tim GCG BPKP (2013), *good corporate governance* (GCG) merupakan praktik terbaik yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan yang berhasil yang mengacu pada bauran antara alat, mekanisme, dan struktur yang menyediakan kontrol dan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Praktik terbaik ini mencakup praktik bisnis, aturan main, struktur proses, dan prinsip yang dimiliki.

GCG sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan, (*World Bank*).

Melalui GCG antara perusahaan dan *stakeholders* (termasuk pelanggan) dapat ditumbuhkan kondisi saling percaya. Adanya kepercayaan ini secara langsung maupun tidak langsung akan memungkinkan perusahaan meningkatkan keuntungan. Kepercayaan dapat menggiring pelanggan untuk menjadi loyal. Keberadaan kepercayaan juga mencegah karyawan dan pemasok bertindak oportunistik dan menjadi katalisator, perusahaan akan mampu menciptakan keunggulan bersaing. Dan yang juga sangat penting adalah bahwa saling percaya akan mengubah fungsi pengawasan dari prinsip saling curiga. Dengan adanya keselarasan berlandaskan etika dengan *stakeholders*, maka citra dan reputasi perusahaan akan terpelihara. Untuk itu, maka GCG membutuhkan beberapa prinsip, antara lain prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam transaksi bisnis yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja perusahaan (OECD, 2004).

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (Sedarmayanti, 2004). Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif (*effective oversight*) berdasarkan *balance of power*

antara manajer, pemegang saham, Dewan Komisaris, dan auditor. Merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham (FCGI, 2014). Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan. Dengan demikian jika indikator-indikator akuntabilitas diimplementasikan dengan baik maka, kinerja perusahaan pun juga akan menjadi lebih baik (OECD, 2004).

Keterbukaan adalah hak – hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan – perubahan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan (FCGI, 2014). Indikator yang mempengaruhi keterbukaan adalah; keterbukaan kepada pemegang saham, keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, keterbukaan dalam proses audit. Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat

ditingkatkan. Ketika indikator-indikator ini diimplementasikan maka tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan akan meningkat dan meningkatkan nilai perusahaan dan akhirnya akan memacu peningkatan kinerja (OECD, 2004).

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Indikator pertanggungjawaban adalah; pemahaman peraturan yang berlaku, penetapan tata nilai dan budaya yang dianut perusahaan. Pertanggungjawaban menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan (OECD, 2004).

Ketika setiap kegiatan perusahaan dilakukan dengan mentaati regulasi yang ada, maka kinerja perusahaan akan meningkat. Karena setiap regulasi yang ada dibuat untuk mencapai perusahaan yang dapat bersaing secara sehat dan mensejahterakan para *stakeholder* yang ada didalamnya (Sedarmayanti, 2004).

Kemandirian adalah yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kemandirian memiliki beberapa indikator; pengambilan keputusan yang tidak merugikan perusahaan, Pengambilan keputusan yang objektif. Prinsip ini menuntut para pengelola

perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholder* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan (OECD, 2004).

Dengan pengelola perusahaan dapat bertindak tanpa dipengaruhi pihak manapun, maka potensi terjadinya pengambilan keputusan yang akan merugikan perusahaan dapat diminimalisir. Sehingga keputusan yang diambil murni untuk kepentingan perusahaan akan membawa kinerja perusahaan kearah yang lebih baik.

Kewajaran adalah perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (FGCI, 2014). Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Dengan demikian setiap *stakeholder* akan bertindak untuk kepentingan perusahaan dan akan menghasilkan kinerja yang baik bagi perusahaan (OECD, 2004).

Kebutuhan akan *good corporate governance* timbul berkaitan dengan *agency theory*, yaitu untuk menghindari konflik antara principal dan agentnya.

Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian pada para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Korporasi yang dibentuk dan merupakan suatu Entitas tersendiri yang terpisah merupakan Subyek Hukum, sehingga keberadaan korporasi dan *stakeholders* tersebut haruslah dilindungi melalui penerapan GCG (BKPP, 2013).

Perusahaan daerah yang diharapkan dapat membiayai kegiatan pemerintah daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah. Namun dalam kenyataannya penerimaan daerah yang berasal dari BUMD masih relatif kecil bila dibandingkan dengan pajak daerah dan retribusi daerah, bahkan beberapa perusahaan menjadi beban pemerintah daerah.

Adapun fenomena yang terjadi, sebanyak 1.007 jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di seluruh Indonesia pada tahun 2012, ternyata sekitar 80 persen diantaranya belum dikelola secara profesional. Ketua Umum DPP Badan Kerjasama BUMD Seluruh Indonesia (BK BUMD-SI) Arif Afandi mengatakan, saat ini terdapat 1.007 BUMD secara nasional dengan total aset mencapai Rp 343,1 triliun. Sayangnya, potensi yang cukup besar ini belum seluruhnya dikelola secara profesional. (*Koran Nusantara*, 03/16/2012)

Hal yang sama terjadi di Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2013 dari 9 Perusahaan Daerah yang ada, hanya 4 Perusahaan yang bisa meraih untung sedangkan sisanya belum memberikan kontribusi terhadap PAD (*Padang express*, 06/06/2013). Pada (<http://www.koran.padek.co/>, 13/11/2014) Komisi III DPRD Sumbar dalam rapat kerja dengan mitra kerja pada tanggal 12 November

2014 menilai penunjukan manajemen sejumlah BUMD di Sumbar tidak profesional, dimana manajemen yang ditunjuk tidak mampu menjalankan perusahaan dengan baik sehingga tidak mampu untuk memberikan kontribusi terhadap PAD, padahal sektor yang menjadi fokus perusahaan-perusahaan ini memiliki potensi yang besar. Sementara itu hasil penilaian kinerja yang dilakukan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) pada tahun 2013 dari 16 PDAM di Sumbar hanya 5 PDAM yang dikategorikan berkinerja sehat, sedangkan sisanya dikategorikan kurang sehat/sakit. Penilaian ini dilakukan berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia.

Dari fenomena di atas dapat terlihat bahwa kinerja perusahaan daerah masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena pengelolaan perusahaan daerah belum dilakukan secara profesional. Pengelolaan perusahaan yang profesional dapat diperoleh dengan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Fadlin dan Heri (2012) yang menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan daerah pada PT Riau Airlines. Hasilnya menunjukkan terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara akuntabilitas terhadap kinerja perusahaan daerah PT RAL. Asas keterbukaan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja PT RAL. Pertanggungjawaban memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja PT RAL. Asas Kemandirian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja PT RAL. Dan asas kewajaran juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan

terhadap kinerja PT RAL. Sementara itu juga replikasi dari penelitian Suryanto (2007) menguji Pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip GCG atas kinerja BUMN. Penelitian yang memiliki responden seluruh BUMN di Indonesia dan menggunakan model analisis jalur ini menunjukkan bahwa secara parsial kewajaran, akuntabilitas dan pertanggungjawaban tidak berpengaruh positif terhadap kinerja BUMN, sedangkan transparansi berpengaruh positif.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda karena penelitian ini tidak mengukur hubungan secara langsung maupun tidak langsung suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dan juga difokuskan pada perusahaan daerah di provinsi Sumatera Barat. Alasan peneliti memilih perusahaan daerah di Sumbar karena kinerja perusahaan daerah di Sumbar masih belum optimal. Sementara itu penelitian ini Maka dari itu, peneliti mencoba untuk menguji apakah prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan daerah dengan meninjau aspek akuntabilitas, keterbukaan, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Oleh karena itu, dengan bertitik tolak dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Daerah (Studi Empiris Pada Perusahaan Daerah di Provinsi Sumatera Barat).**

B. Perumusan Masalah

1. Sejauhmana pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja perusahaan daerah?
2. Sejauhmana pengaruh keterbukaan terhadap kinerja perusahaan daerah?

3. Seauhmana pengaruh pertanggungjawaban terhadap kinerja perusahaan daerah?
4. Seauhmana pengaruh kemandirian terhadap kinerja perusahaan daerah?
5. Seauhmana pengaruh kewajaran terhadap kinerja perusahaan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja perusahaan daerah.
2. Pengaruh keterbukaan terhadap kinerja perusahaan daerah.
3. Pengaruh pertanggungjawaban terhadap kinerja perusahaan daerah.
4. Pengaruh kemandirian terhadap kinerja perusahaan daerah.
5. Pengaruh kewajaran terhadap kinerja perusahaan daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Perusahaan Daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah, dapat bermanfaat sebagai masukan dalam memaksimalkan kinerja perusahaan daerah.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat dijadikan referensi yang akan mengadakan kajian lebih luas dalam bahasan ini.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kinerja Perusahaan

a. Pengertian Kinerja Perusahaan

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Indra, 2010).

Bernardin dan Russell (dalam Ahmad, 2002) memberikan pengertian atau kinerja sebagai berikut: “*performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period*”. Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu.

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai norma dan etika (Prawirosentoso dalam Lijan, 2006).

Rumusan diatas menjelaskan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau lembaga dalam melaksanakan pekerjaannya. Dari definisi diatas, terdapat setidaknya empat elemen, yaitu (1) hasil kerja yang dicapai secara individual atau secara institusi, yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau berkelompok; (2) dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk bertindak sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik. Meskipun demikian orang atau lembaga tersebut tetap harus dalam kendali, yakni mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pemberi hak dan wewenang tersebut; (3) pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, dan (4) Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral dan etika, artinya selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai dengan moral dan etika yang berlaku umum (Lijan, 2006).

Dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, pimpinan melakukan tugasnya dibantu oleh pimpinan yang lain bersama dengan pegawai mereka. Keberhasilan pimpinan melaksanakan tugasnya akan dipengaruhi oleh kontribusi pihak lain. Artinya, kinerja pimpinan akan dipengaruhi oleh kinerja pegawai, jika kinerja pegawai baik akan mempengaruhi kinerja pimpinan dan selanjutnya kinerja organisasi, untuk mengetahui perlu dilakukan pengukuran (Indra, 2010).

Undang-undang Republik Indonesia No 5 tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, mendefinisikan perusahaan daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan berdasarkan undang-undang.

Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modal yang dimiliki adalah milik Pemerintah Daerah, baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Kamus Bisnis dan Bank, 2013)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. (Wikipedia)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan daerah adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari sumber lainnya yang telah ditentukan oleh undang-undang.

b. Penilaian Kinerja

Larry D Stout (1993) dalam Bungo (2012) menyatakan bahwa penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.

Penilaian kinerja dapat diukur dengan ukuran keuangan dan nonkeuangan. Ukuran keuangan untuk mengetahui hasil tindakan yang dilakukan dimasa lalu dan ukuran keuangan tersebut dilengkapi dengan ukuran-ukuran nonkeuangan tentang kepuasan konsumen, produktivitas dan cost effectiveness proses bisnis intern serta produktivitas dan komitmen stakeholders yang akan menentukan kinerja keuangan masa yang akan datang. Ukuran nonkeuangan menunjukkan akibat dari berbagai tindakan yang terjadi di luar keuangan.

Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk memotivasi *stakeholders* dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Penilaian kinerja digunakan untuk menekan perilaku yang semestinya diinginkan, melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik.

Menurut Mulyadi (2001) penilaian kinerja dimanfaatkan organisasi untuk:

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian personel secara maksimum.
2. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan seperti: promosi, transfer dan pemberhentian.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan personel dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan personel.
4. Menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan.

c. Pengukuran Kinerja

Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada input program, tetapi juga pada output dari program tersebut.

Menurut Mulyadi (2001) secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja adalah:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*).
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengakomodasikan pemahaman kepentingan manajer level bawah dan menengah serta memotivasi untuk mencapai *good congruence*.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

d. Indikator kinerja

1). Faktor Finansial

a. *Return on Investment* (ROI)

ROI adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksud untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva fisik yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. ROI adalah kinerja yang paling lazim sebagai suatu pusat investasi (Hansen dan Mowen dalam Bungo, 2012).

b. *Economic Value Added (EVA)*

Pengukuran kinerja yang tepat seharusnya dapat mengukur bagaimana manajemen menciptakan nilai tambah bagi perusahaannya sehingga kemakmuran para pemegang saham dapat ditingkatkan. Dalam hal ini EVA memenuhi kriteria sebagai pengukuran kinerja yang lebih baik sehingga investor dapat mengetahui kinerja manajemen sesungguhnya, tidak hanya meningkatkan laba tapi juga bagaimana perusahaan mampu menghasilkan suatu nilai tambah ekonomis bagi perusahaan.

EVA adalah laba yang dihitung dari selisih antara laba sebelum pajak dikurangi dengan biaya modal yang diperhitungkan atas investasi. EVA adalah Jumlah uang, bukan rasio. EVA dapat diperoleh dengan Mengurangi beban modal dari laba operasi bersih (Anthony dan Govindarajan dalam Bungo, 2012). Biaya modal yang diperhitungkan merupakan biaya kesempatan atau biaya peluang atas investasi yang ditanamkan dalam suatu divisi atau perusahaan (Supriyono dalam Bungo, 2012).

c. *Return on Asset (ROA)*

ROA adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba sebelum pajak dan bunga dengan total aset perusahaan, semakin besar ROA suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan tersebut dari penggunaan aset.

d. *Return on Equity (ROE)*

ROE adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba setelah pajak dengan modal, rasio ini menunjukkan tingkat

presentase yang dapat dihasilkan. Modal sendiri merupakan modal dalam perusahaan yang dipertahankan untuk segala, baik resiko usaha maupun resiko kerugian lainnya, setiap perusahaan harus memiliki sejumlah minimum modal yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidupnya.

Untuk mengukur laba secara menyeluruh dan sekaligus hasil kebijakan pemenuhan kebutuhan dananya, maka digunakan rasio laba bersih terhadap modal sendiri. Dengan demikian ROE merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden, kenaikan dalam rasio ini berarti menjadi kenaikan laba bersih, selanjutnya kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham (Dendawijaya dalam Bungo, 2012).

2). Faktor Nonfinansial

Menurut Kaplan dan Norton (2000) ukuran kinerja keuangan terdiri dari:

a. Ukuran kinerja dari perspektif pelanggan

Penilaian kinerja pelanggan ini sangat penting, karena maju atau menurunnya kinerja perusahaan sangat ditentukan oleh pelanggan, apalagi masuknya era globalisasi sehingga persaingan antar perusahaan menjadi sangat ketat. Jadi perusahaan harus bersaing dengan usaha mencari pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Kaplan (2000) menjelaskan untuk memasarkan produknya perusahaan terlebih dahulu harus menentukan segmen calon pelanggan mana yang harus dimasuki

oleh perusahaan, dengan demikian akan lebih jelas dan lebih terfokus tolak ukurnya.

Akhir-akhir ini fokus strategi perusahaan lebih diarahkan pada pelanggan (*customer drive strategy*), dengan kata lain apa yang dibutuhkan pelanggan harus dipenuhi oleh perusahaan. Kinerja produk yang dihasilkan perusahaan minimal harus sama dengan apa yang dipersepsikan oleh pelanggan. Kualitas produk yang kurang, menyebabkan konsumen akan pindah ke produk lain, kualitas produk yang tinggi akan menyebabkan perusahaan akan rugi karena kehilangan potensi laba yang tinggi dan sebaliknya konsumen merasa beruntung karena mendapatkan produk kualitas tinggi dengan harga standar.

Untuk mendapatkan laba maksimum perusahaan harus mampu mempersepsikan kualitas produk yang diinginkan pelanggan yang sesuai dengan harga jualnya. Dalam perspektif ini, pengukuran dilakukan dengan lima aspek utama; yaitu

- a) Pengukuran pangsa pasar, pengukuran terhadap besarnya pangsa pasar perusahaan mencerminkan proporsi bisnis dalam satu area bisnis tertentu yang diungkapkan dalam bentuk uang, jumlah pelanggan, atau unit volume yang terjual atas setiap unit produk yang terjual.
- b) *Customer retention*, pengukuran dapat dilakukan dengan mengetahui besarnya persentase pertumbuhan bisnis dengan jumlah pelanggan yang saat ini dimiliki oleh perusahaan.

- c) *Customer acquisition*, pengukuran dapat dilakukan melalui persentase jumlah penambahan pelanggan baru dan perbandingan total penjualan dengan jumlah pelanggan baru yang ada.
 - d) *Customer satisfaction*, pengukuran terhadap tingkat kepuasan pelanggan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik diantaranya adalah: survey melalui surat (pos), interview melalui telepon, atau personal interview.
 - e) *Customer profitability*, pengukuran terhadap customer profitability dapat dilakukan dengan menggunakan teknik *Activity Based-Costing* (ABC).
- b. Ukuran kinerja dari perspektif proses bisnis internal

Penilaian kinerja yang ketiga dengan perspektif bisnis internal. Untuk bisa menggunakan tolak ukur kinerja ini, maka perusahaan harus mengidentifikasi proses bisnis internal yang terjadi pada perusahaan. Secara umum proses tersebut terdiri dari inovasi, operasi dan layanan purna jual (*after sales service*).

Tahap pertama yaitu inovasi. Dalam tahap ini perusahaan mencoba untuk mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan atau calon pelanggan baik sekarang maupun dimasa yang akan datang. Untuk mengidentifikasi ini perusahaan mencoba untuk merumuskan apa yang sebenarnya dibutuhkan dan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Pengidentifikasian serta perumusan apa yang akan diproduksi tersebut sebenarnya terletak pada tahap penelitian dan

pengembangan produk (litbang), dengan demikian terlihat proses inovasi ini terletak pada fungsi “litbang” ini.

Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi pasar, setelah diketahui produk apa yang diinginkan tersebut dilanjutkan dengan membuat *blueprint* produk tersebut. Proses dilanjutkan dengan memproduksi produk tersebut sebanyak yang dibutuhkan dan menjual produk tersebut di pasar sasaran oleh bagian marketing perusahaan. Dari pemasaran yang dilakukan nantinya akan terlihat apakah produk yang dihasilkan bisa memenuhi kebutuhan konsumen sehingga dapat diketahui tingkat kepuasan konsumen atas produk tersebut.

Tolak ukur yang dipakai dalam menentukan kinerja proses inovasi diantaranya adalah:

- a) Banyaknya produk yang dihasilkan dan dikembangkan secara relatif dengan membandingkannya dengan produk pesaing dan barang substitusi yang sesuai dengan perencanaan strategik perusahaan.
- b) Besarnya jumlah penjualan produk baru dan lama waktu pengembangan produk secara relatif dibandingkan dengan para pesaing dan perencanaan strategik perusahaan.
- c) Lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai penjualan produk baru tersebut.
- d) Besarnya biaya pengembangan produk baru yang diperlukan dibandingkan dengan perusahaan pesaing dan rencana strategik perusahaan.

e) Frekuensi modifikasi atas produk- produk yang dikembangkan secara relative dibandingkan dengan pesaing dan rencana strategik perusahaan.

Berkenaan dengan proses operasi, dalam pembuatan produk proses pengukuran pembuatan produk dapat dibagi atas 3 bagian yaitu:

a) Pengukuran kualitas diarahkan untuk mengetahui apakah program yang sedang dijalankan oleh perusahaan sudah dijalankan dengan baik. Kalau menggunakan tolak ukur keuangan. Kualitas produk bisa menggunakan biaya mutu yang mencakup biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal.

b) Pengukuran biaya diarahkan pada pengukuran rangkaian aktivitas. Aktivitas yang dilakukan diarahkan pada aktivitas yang bernilai tambah (*value added*), sehingga aktivitas yang bersifat *non-value added* terus diminimalisasi dengan melakukan perbaikan yang terus-menerus (*continuous improvement*) sehingga akhirnya biaya yang *non-value added* akhirnya sangat minimal sehingga diharapkan *cost of production* hanyalah biaya yang bersifat *value added* saja. Untuk menerapkan konsep ini perusahaan dapat menggunakan konsep *activity based of management* (ABM).

c) Pengukuran waktu.

Saat ini cenderung perusahaan menganggap komponen waktu adalah hal yang sangat penting. Penyelesaian dan penyerahan barang yang tepat waktu dianggap sesuatu hal yang dapat memuaskan konsumen. Dalam hal proses produksi Kaplan (2000) menjelaskan bahwa

Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) yang terbaik adalah satu, dengan kata lain waktu yang digunakan oleh perusahaan sama dengan waktu proses. Apabila MCE ini lebih rendah itu berarti perusahaan menggunakan sebagian dari waktunya dengan sia-sia.

c. Ukuran kinerja dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

Pembelajaran dan pertumbuhan ini bersumber dari tiga prinsip yaitu *people*, *system* dan *organizational procedure*. Berkaitan dengan ketiga prinsip tersebut. Kaplan (2000) menjelaskan perspektif ini sebagai berikut:

- a) Kemampuan Pekerja. Saat ini pekerjaan rutin dalam proses produksi sudah digantikan oleh mesin-mesin yang serba otomatis. Dengan demikian tenaga kerja buruh kasar yang diperlukan relative sedikit, sehingga tenaga kerja yang tinggal hanyalah tenaga kerja yang spesialis saja. Semakin sedikitnya tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan menyebabkan perusahaan lebih dapat memberikan akses informasi yang lebih layak kepada pekerjanya untuk lebih meningkatkan efisiensi untuk mencapai tujuan perusahaan. Tolak ukur yang dapat digunakan untuk ini adalah: tingkat kepuasan pekerja pegawai, tingkat perputaran tenaga kerja, besarnya pendapatan perusahaan per karyawan dan yang terakhir adalah nilai tambah dari tiap karyawan.
- b) Kemampuan sistem informasi. Dalam kondisi yang sangat kompetitif, sistem informasi yang handal sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan. Kemampuan sistem informasi ini sangat ditentukan oleh

tingkat ketersediaan informasi, tingkat keakuratan informasi dan jangka waktu yang diperlukan untuk memperoleh informasi tersebut. Hal ini disebabkan betapapun akuratnya suatu informasi yang diterima oleh perusahaan tapi apabila jangka waktunya telah berlalu maka informasi tersebut tidak berguna lagi.

- c) Motivasi. Untuk dapat menciptakan motivasi pegawai diperlukan iklim organisasi yang mampu menciptakan motivasi itu sendiri dan mendorong inisiatif karyawan. Keberhasilan aspek ini bisa dilihat dari jumlah saran yang diajukan karyawan, jumlah saran yang diimplementasikan dan tingkat kemampuan karyawan untuk mengetahui visi dan misi yang diemban oleh perusahaan.

2. *Corporate Governance*

a. *Pengertian Corporate Governance*

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen, board dan pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate Governance* juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan atas kinerja.

Turnbull Report dalam Sonia (2012) mendefinisikan corporate governance sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi

tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Sedangkan menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), *corporate governance* adalah proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya.

Tim GCG BPKP mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai berikut, yaitu: Komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2014) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Sementara itu *Cadbury Committee* dalam Suryo (2007) dari Inggris mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik

internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka, atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

b. Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

OECD (2004) mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip *corporate governance* atau yang lebih dikenal sebagai *The OECD Principles of Corporate Governance*. Prinsip-prinsip dasar dari *good corporate governance* meliputi:

- 1) Keterbukaan (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.

Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

- 2) Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholder's lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai

tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

- 3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan.

- 4) Kemandirian (*Independency*), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa

pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholder's yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

- 5) Kewajaran (*Fairness*), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) sebuah organisasi profesional non-pemerintah yang bertujuan mensosialisasikan praktik *good corporate governance* menjabarkan prinsip – prinsip di atas sebagai berikut:

- 1) *Fairness* (Kewajaran)

Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*Insider Trading*).

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan – kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, *self-dealing* dan konflik kepentingan, menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Komite, termasuk sistem remunerasi menyajikan informasi secara wajar/pengungkapan material apa pun mengedepankan *Equal Job Opportunity*.

2) *Disclosure dan Transparency* (Keterbukaan)

Hak – hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan – perubahan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang tepat dan akurat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholder*).

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi (*accounting system*) yang berbasiskan standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan *Information Technology* (IT) dan *Management Information System* (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses

pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengembangkan *enterprise risk management* yang memastikan bahwa semua resiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

3) *Accountability* (Akuntabilitas)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif (*effective oversight*) berdasarkan *balance of power* antara manajer, pemegang saham, Dewan Komisaris, dan auditor. Merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan Laporan Keuangan (*Financial Statement*) pada waktu yang tepat dan cara yang tepat; mengembangkan Komite Audit dan Resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris; mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi Internal Audit sebagai mitra bisnis strategis berdasarkan *best practice* (bukan sekedar audit). Transformasi menjadi “*Risk-based*” Audit; menjadi manajemen kontrak yang bertanggung jawab dan menangani pertentangan (*dispute*); penegakan hukum (Sistem Penghargaan dan sanksi); menggunakan *External Auditor* yang memenuhi syarat (berbasis professional).

4) *Responsibility* (Responsibilitas)

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang; menyadari akan adanya tanggung jawab sosial; menghindari penyalahgunaan kekuasaan; menjadi profesional dan menjunjung etika; memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

OECD menyatakan bahwa kerangka kerja *corporate governance* seharusnya:

- 1) Melindungi hak pemegang saham.
- 2) Memperlakukan seluruh pemegang saham dengan sama.
- 3) Mengakui hak-hak stakeholder sesuai dengan hukum yang berlaku dan menerapkan konsep corporate yang baik.
- 4) Mengungkapkan seluruh hal material perusahaan dengan akurat dan tepat waktu, termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan.
- 5) Memastikan panduan strategik perusahaan, pengawasan manajemen oleh dewan yang efektif dan pertanggungjawaban dewan kepada perusahaan dan pemegang saham.

Prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* ini diharapkan menjadi titik rujukan bagi para regulator (pemerintah) dalam membangun framework bagi penerapan *good corporate governance*.

c. Manfaat *Good Corporate Governance*

Manfaat dari pelaksanaan GCG menurut FCGI (2014):

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value.
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan deviden.

Sedangkan manfaat praktis penerapan corporate governance adalah (Naja dalam Sonia, 2012):

- 1) Meminimalkan *agency cost*, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk biaya penggunaan sumber daya perseroan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri.

- 2) Meminimalkan *cost of capital*, yaitu biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Hal ini sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan secara baik dan sehat yang pada gilirannya menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur.
- 3) Meningkatkan nilai saham perusahaan, dengan pengelolaan perusahaan yang baik tentu akan dapat menarik minat dan kepercayaan para investor, sehingga akan sangat membantu usaha (bisnis) perseroan. Tingginya harga saham perseroan akan menjadi tolak ukur positif mengenai keberhasilan suatu korporasi, yang pada dasarnya adalah keberhasilan manajemen.
- 4) Mengangkat citra perusahaan, dengan berhasilnya peningkatan harga saham maka akan terangkat nama perusahaan tersebut dan dengan terangkatnya nama perusahaan akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri dan menimbulkan image positif terhadap opini yang berkembang di masyarakat.

d. Pengukuran *Corporate Governance*

Kualitas penerapan *corporate governance* di perusahaan perlu diuji bukan hanya terhadap adanya pedoman *corporate governance* yang dimiliki perusahaan tetapi juga terhadap efektivitas pelaksanaan pedoman tersebut untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham tanpa merugikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya. Maka dari itu suatu analisis atas kajian mengenai praktik *corporate governance* diperlukan untuk membantu investor

dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai governance di suatu perusahaan. Sistem pemeringkatan dengan skor atau indeks corporate governance dapat memberikan informasi seberapa baik perusahaan menerapkan corporate governance.

1) Akuntabilitas (*Accountability*)

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (Sedarmayanti, 2004). Menurut (OECD, 2004) akuntabilitas merupakan kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan *stakeholder's* lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

b. Indikator Akuntabilitas

Menurut OECD (2004), indikator akuntabilitas terdiri dari;

- 1) Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan telah mengetahui visi, misi, tujuan dan target-target operasional di perusahaan

- 2) Pimpinan, manajer, karyawan perusahaan telah mengetahui dan memahami peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing
- 3) Uraian tugas di setiap unit usaha atau unit organisasi telah ditetapkan dengan benar dan sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan
- 4) Proses dalam pengambilan keputusan telah mengacu dan mentaati sistem dan prosedur yang telah dibangun.
- 5) Proses cek dan balance telah dilakukan secara menyeluruh di setiap unit organisasi.
- 6) Sistem penilaian kinerja operasional, organisasi dan kinerja perseorangan telah sepakat ditetapkan, diterapkan dan dievaluasi dengan baik
- 7) Pertanggungjawaban kinerja pimpinan (BOC, BOD) perusahaan secara rutin seyogyanya dapat dibangun dan dilaporkan.
- 8) Hasil pekerjaan telah didokumentasikan, dipelihara dan dijaga dengan baik

2) Keterbukaan (*Transparency*)

a. Pengertian Keterbukaan

Keterbukaan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Keterbukaan yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang

dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Loina dalam Riki, 2010)

Keterbukaan adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan (OECD, 2004). Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

b. Indikator Keterbukaan

Menurut OECD (2004), indikator keterbukaan terdiri dari;

- 1) Bahwa berbagai pemegang kepentingan (manajemen, karyawan, pelanggan) dapat melihat dan memahami proses dalam pengambilan keputusan manajerial di perusahaan.
- 2) Pemegang saham berhak memperoleh informasi keuangan perusahaan yang relevan secara berkala dan teratur.
- 3) Proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional perusahaan telah dilakukan oleh unit organisasi dan karyawan secara terbuka dan obyektif, dengan tetap menjaga kerahasiaan nasabah/pelanggan

- 4) Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan telah melakukan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, sistem pengawasan dan standardisasi yang dilakukan.
- 5) Informasi tentang prosedur dan kebijakan di unit kerja maupun unit organisasi telah dipublikasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh semua pihak di dalam dan oleh unit-unit terkait di luar perusahaan.
- 6) Eksternal auditor, komite audit, internal auditor memiliki akses atas informasi dengan syarat kerahasiaan tetap dijaga.
- 7) Menyampaikan laporan keuangan audited dan kinerja usaha ke publik secara rutin, maupun laporan corporate governance pada instansi yang berwenang.

3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

a. Pengertian Pertanggungjawaban

Menurut FCGI (2014), peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

Ini merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang; menyadari akan adanya

tanggung jawab sosial; menghindari penyalahgunaan kekuasaan; menjadi profesional dan menjunjung etika; memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

b. Indikator Pertanggungjawaban

Menurut OECD (2004), indikator pertanggungjawaban terdiri dari;

- 1) Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan telah mengetahui dan memahami seluruh peraturan perusahaan yang berlaku.
- 2) Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan telah menerapkan sistem tata nilai dan budaya perusahaan yang dianut perusahaan.
- 3) Proses dalam pengambilan keputusan di perusahaan senantiasa mengacu dan mentaati sistem dan prosedur yang telah dibangun.
- 4) Manajer dan karyawan perusahaan telah bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur maupun ketentuan yang berlaku di perusahaan.
- 5) Unit kerja organisasi perusahaan telah berupaya menghindari pengelolaan perusahaan yang berpotensi merugikan perusahaan dan stakeholder.
- 6) Proses pendelegasian kewenangan telah dijalankan dengan cukup dan baik demi terselenggaranya pekerjaan.
- 7) Manajer dan unit organisasi telah melakukan pertanggungjawaban hasil kerja secara teratur.

4) Kemandirian (*Independency*)

a. Pengertian Kemandirian

Kemandirian adalah yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari

pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (OECD, 2004). Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholder's* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

b. Indikator Kemandirian

Menurut OECD (2004), indikator kemandirian terdiri dari;

- 1) Keputusan pimpinan perusahaan hendaknya lepas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan perusahaan.
- 2) Proses pengambilan keputusan di perusahaan telah dilakukan secara obyektif untuk kepentingan perusahaan.

5) Kewajaran (*Fairness*)

a. Pengertian Kewajaran

Menurut FCGI (2014), kewajaran adalah perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*Insider Trading*).

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas, membuat pedoman

perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan – kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, *self-dealing* dan konflik kepentingan, menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Komite, termasuk sistem remunerasi menyajikan informasi secara wajar/pengungkapan material apa pun mengedepankan *Equal Job Opportunity*.

b. Indikator Kewajaran

Menurut OECD (2004), indikator kewajaran terdiri dari;

- 1) Pengelola dan karyawan perusahaan akan memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder secara wajar menurut ketentuan yang berlaku umum.
- 2) Perlakuan adil kepada seluruh pihak pemegang kepentingan (nasabah, pelanggan, pemilik) dalam memberikan pelayanan dan informasi.
- 3) Manajer, pimpinan unit organisasi dan karyawan dapat membedakan kepentingan perusahaan dengan kepentingan organisasi.
- 4) Perlakuan, pengembangan teamwork, hubungan kerja dan pembinaan pada para karyawan akan dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajibannya secara adil dan wajar.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Fadlin dan Heri (2012) menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan milik daerah PT. Riau Airlines. Responden penelitiannya adalah semua pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan. Hasilnya menunjukkan terdapat pengaruh yang sangat signifikan

antara akuntabilitas terhadap kinerja perusahaan daerah PT RAL. Asas keterbukaan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja PT RAL. Pertanggungjawaban memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja PT RAL. Asas Kemandirian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja PT RAL. Dan asas kewajaran juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja PT RAL.

Penelitian Ridwan (2008) menguji Pengaruh penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan PT. Jamsostek Cabang II Bandung. Hasilnya menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara akuntabilitas terhadap kinerja perusahaan daerah kinerja PT. Jamsostek. Asas keterbukaan memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja PT. Jamsostek. Pertanggungjawaban memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja PT. Jamsostek. Asas Kemandirian memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja PT. Jamsostek. Dan asas kewajaran juga memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja PT. Jamsostek.

Penelitian Suyanto (2007) menguji Pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip GCG atas kinerja BUMN. Penelitian yang memiliki responden seluruh BUMN di Indonesia ini, menunjukkan bahwa secara parsial kewajaran, akuntabilitas dan pertanggungjawaban tidak berpengaruh positif terhadap kinerja BUMN, sedangkan transparansi berpengaruh positif.

Penelitian Mappaselle (2013) meneliti tentang pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk cabang Palopo

ini menghasilkan kesimpulan bahwa secara parsial prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran dan kesetaraan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan prinsip independensi dan tanggung jawab tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

C. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Akuntabilitas dengan Kinerja Perusahaan Daerah

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (Sedarmayanti, 2004). Menurut OECD (2004) akuntabilitas merupakan kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan *stakeholder's* lainnya

Penelitian Fadlin dan Heri (2012) menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan milik daerah PT. Riau Airlines. Hasilnya menunjukkan terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara akuntabilitas terhadap kinerja perusahaan daerah PT RAL. Penelitian Ridwan (2008) menguji Pengaruh penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan PT. Jamsostek Cabang II Bandung. Hasilnya menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara akuntabilitas terhadap kinerja perusahaan daerah kinerja PT. Jamsostek.

Dengan adanya akuntabilitas, maka dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan. Komisaris bertanggung

jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan. Dengan demikian semakin baik akuntabilitas maka akan semakin baik pula kinerja perusahaan daerah.

2. Hubungan Keterbukaan dengan Kinerja Perusahaan Daerah

Keterbukaan adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan (OECD, 2004). Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

Penelitian Fadlin dan Heri (2012) menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan milik daerah PT. Riau Airlines. Responden penelitiannya adalah semua pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan. Hasilnya menunjukkan keterbukaan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja PT RAL. Penelitian Ridwan (2008) menguji Pengaruh penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan PT. Jamsostek Cabang II Bandung. Hasilnya menunjukkan keterbukaan memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja PT. Jamsostek.

Dalam hubungannya dengan meningkatkan kinerja perusahaan, prinsip ini mengatur bagaimana pihak manajemen dapat memajemen resiko untuk memastikan seluruh resiko dapat dikelola pada waktu yang dapat ditolerir yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan itu sendiri. Selain itu, dalam prinsip ini juga mengatur pengembangan teknologi informasi, memastikan penilaian kinerja yang terbaik, secara proses pengambilan keputusan yang efektif oleh pihak komisaris dan manajemen dimana keputusan ini dapat terkait dengan kinerja perusahaan yang mengarahkan pada kinerja yang semakin baik. Inti dari prinsip ini adalah meningkatkan keterbukaan dari kinerja perusahaan secara teratur, tepat waktu dan benar. Dengan demikian semakin baik keterbukaan maka kinerja perusahaan daerah juga akan semakin baik.

3. Hubungan Pertanggungjawaban dengan Kinerja Perusahaan Daerah

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku (OECD, 2004). Pertanggungjawaban menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan.

Penelitian Fadlin dan Heri (2012) menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan milik daerah PT. Riau Airlines. Responden penelitiannya adalah semua pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa pertanggungjawaban memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja PT RAL. Penelitian Ridwan (2008) menguji Pengaruh penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan PT. Jamsostek Cabang II Bandung. Hasilnya menunjukkan pertanggungjawaban memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja PT. Jamsostek.

Prinsip ini mengatur pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder's* yang mencakup hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan seluruh *stakeholder* untuk mewujudkan perusahaan sebagai *good corporate citizen*. Dengan demikian perusahaan akan menjadi profesional dan penuh etika, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pertanggungjawaban maka akan semakin baik pula kinerja perusahaan daerah.

4. Hubungan Kemandirian dengan Kinerja Perusahaan Daerah

Kemandirian adalah yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (OECD, 2004). Prinsip

ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku.

Penelitian Fadlin dan Heri (2012) menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan milik daerah PT. Riau Airlines. Responden penelitiannya adalah semua pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan. Hasilnya menunjukkan kemandirian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja PT RAL. Penelitian Ridwan (2008) menguji Pengaruh penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan PT. Jamsostek Cabang II Bandung. Hasilnya menunjukkan kemandirian memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja PT. Jamsostek.

Prinsip ini mengatur tentang bagaimana perusahaan harus mampu menghindari terjadinya dominasi tidak wajar oleh *stakeholders*. Pengelola perusahaan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perusahaan dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi dan pihak-pihak yang diberi tugas untuk mengelola kegiatan perusahaan bebas dari tekanan atau pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan yang tidak selaras dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam pengelolaannya perusahaan lebih meyakini dan lebih percaya pada dirinya sendiri dan lebih mengetahui keputusan yang terbaik yang harus diambil perusahaan, sehingga kinerjanya akan lebih terpercaya, akurat, dan

menghindari proses penilaian kelayakan yang tidak fair dan juga akan menghindarkan masalah finansial. Dengan demikian jika prinsip kemandirian diimplementasikan dengan baik maka kinerja perusahaan daerah juga akan semakin baik.

5. Hubungan Kewajaran dengan Kinerja Perusahaan Daerah

Kewajaran adalah perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder's yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku (OECD, 2004). Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Penelitian Fadlin dan Heri (2012) menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan milik daerah PT. Riau Airlines. Responden penelitiannya adalah semua pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan. Hasilnya menunjukkan kewajaran memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja PT RAL. Penelitian Ridwan (2008) menguji Pengaruh penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan PT. Jamsostek Cabang II Bandung. Hasilnya menunjukkan kewajaran memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja PT. Jamsostek.

Prinsip ini mengatur bagaimana menetapkan peran dan tanggung jawab komisaris dan manajemen dalam mengelola masing-masing pusat

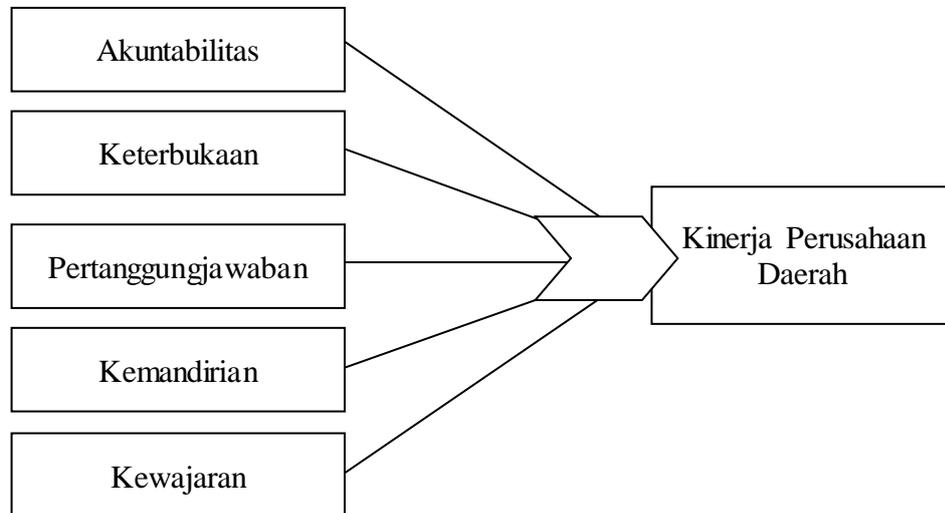
pertanggungjawabannya. *Fairness* meliputi kejelasan hak-hak pemegang saham untuk melindungi kepentingan pemegang saham, termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dari kecurangan, seperti praktik *insider* yang merugikan atau dari keputusan direksi atau pemegang saham mayoritas yang merugikan kepentingan pemegang saham secara keseluruhan, sehingga kinerja perusahaan akan lebih stabil karena para pemegang saham mengetahui secara detail seluruh informasi perusahaan, baik mengenai RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi, struktur modal perusahaan, kebijakan dividen perusahaan, dan lain-lain. Dengan demikian semakin baik penerapan prinsip kewajaran, maka akan semakin baik pula kinerja perusahaan daerah.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu kinerja perusahaan daerah sebagai variabel dependen dengan akuntabilitas keterbukaan, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran sebagai variabel independen.

Untuk lebih jelasnya pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1
Kerangka Konseptual



E. Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H₁ : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan daerah.
- H₂ : Keterbukaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan daerah.
- H₃ : Pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan daerah.
- H₄ : Kemandirian berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan daerah.
- H₅ : Kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan daerah.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pengaruh Akuntabilitas, Keterbukaan, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran terhadap Kinerja Perusahaan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Perusahaan Daerah.
2. Keterbukaan berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Perusahaan Daerah.
3. Pertanggungjawaban berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Perusahaan Daerah.
4. Kemandirian tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan Daerah.
5. Kewajaran berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Perusahaan Daerah.

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Sampel penelitian terbatas pada beberapa Perusahaan Daerah saja. Penelitian ini kemungkinan akan menunjukkan hasil yang berbeda jika sampel ditambah sebagai objek penelitiannya.

2. Kuesioner yang peneliti sebarakan masih terdapat keterbatasan, karena pernyataan dalam kuesioner sangat sedikit poin yang merupakan pernyataan negatif dan sebagian besar menggunakan pernyataan positif. Sehingga ini menyebabkan responden diarahkan untuk pilihan jawaban yang baik atau positif.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak:

1. Perusahaan diharapkan untuk lebih meningkatkan sistem penilaian kinerja operasional, organisasi dan kinerja perseorangan yang disepakati bersama dan dievaluasi dengan lebih baik. Agar nantinya penerapan prinsip Akuntabilitas akan efektif dan membuat kinerja perusahaan daerah meningkat.
2. Walaupun penerapan prinsip keterbukaan telah berjalan efektif tapi masih tersedia banyak ruang bagi perusahaan untuk menjadi lebih baik guna meningkatkan kinerja perusahaan salah satunya adalah dengan meningkatkan tingkat keterbukaan dan keobjektifitasan dalam proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional perusahaan.
3. Sebagaimana halnya dengan prinsip keterbukaan, prinsip pertanggungjawaban yang telah berjalan dengan baik, masih memiliki ruang untuk peningkatan salah satunya adalah dengan meningkatkan penerapan sistem tata nilai dan budaya yang dianut perusahaan

4. Perusahaan Daerah disarankan untuk lebih meningkatkan Kemandirian dalam pengelolaan perusahaan daerah agar dapat mencapai kinerja perusahaan yang lebih baik.
5. Perusahaan daerah diharapkan untuk lebih memperhatikan hak dan kewajiban karyawan secara adil dan wajar dalam hal perlakuan, pengembangan *teamwork*, hubungan kerja dan pembinaan. Agar nantinya penerapan prinsip kewajaran akan meningkatkan kinerja perusahaan daerah.
6. Untuk penelitian selanjutnya, apabila peneliti juga menggunakan kuesioner yang sama sebaiknya pernyataan pada kuesioner dimodifikasi dengan menambahkan pernyataan negatif, agar benar-benar menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada praktik atau penerapan yang ada dilapangan.
7. Selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas sampel dan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat dengan pengelolaan keuangan daerah.